



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dapat tersusun dengan baik.

LKjIP BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 ini merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna peningkatan kinerja internal BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKjIP BPKAD Tahun 2020 ini masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan ini.

Nganjuk, 17 - 02 - 2021

β KEPALA BPKAD



KARTIMAH, SE, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640505 198703 2 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum	2
1.3.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3.2 Susunan Organisasi.....	3
1.3.3 Sumber Daya Manusia.....	4
1.3.4 Bagan Susunan Organisasi	5
1.3.5 Sarana dan Prasarana	7
Bab II Perencanaan Kinerja	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.1.1 Pencapaian Target Tahun 2020.....	21
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020	32
Bab IV Penutup	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi Pertanggungjawaban Kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP BPKAD Kabupaten Nganjuk adalah untuk menyajikan Pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran.

Tujuan dari disusunnya LKJIP BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 antara lain :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dengan pembandingan hasil Pengukuran Kinerja dan Penetapan Kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Bahan Evaluasi untuk Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun berikutnya.

1.3 GAMBARAN UMUM

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk yang dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk serta mulai melaksanakan tugas sebagai salah satu Perangkat Daerah pada tanggal 14 Desember 2016.

Terkait dengan gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1.3.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

BPKAD Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

3. Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan fungsi PPKD (BUD);
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Susunan Organisasi

Dalam pasal 17 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk meliputi :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
3. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan ;
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Belanja Pegawai ;
 - b. Sub Bidang Belanja Non Pegawai.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi ;
 - b. Sub Bidang Pelaporan.
6. Bidang Aset, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan.

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 59 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pegawai menurut Golongan/Ruang berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

No	Golongan/Ruang	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	0
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	1	2
3.	Pembina (IV/a)	3	2	5
4.	Penata Tingkat I (III/d)	2	1	3
5.	Penata (III/c)	8	9	17
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	6	8
7.	Penata Muda (III/a)	-	4	4
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	-	2
9.	Pengatur (II/c)	6	-	6
10.	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
11.	Juru Tingkat I (I/d)	1	-	1
12.	Tenaga Harian Lepas (THL)	7	3	10
	Jumlah	33	26	59

(Data per 31 Desember 2020)

- b. Pegawai menurut pendidikan formal adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S 2 – Pasca Sarjana	6
2.	S 1 - Sarjana	31
3.	Diploma IV	2
3.	Diploma III	5
4.	SLTA	14
5.	SLTP	1
	Jumlah	59

(Data per 31 Desember 2020)

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut :

No	Eselonisasi	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Badan – Eselon II	1
2.	Sekretaris – Eselon III	1
3.	Kepala Bidang – Eselon III	4
4.	Kepala Sub Bagian – Eselon IV	3
5.	Kepala Sub Bidang – Eselon IV	7
	Jumlah	16

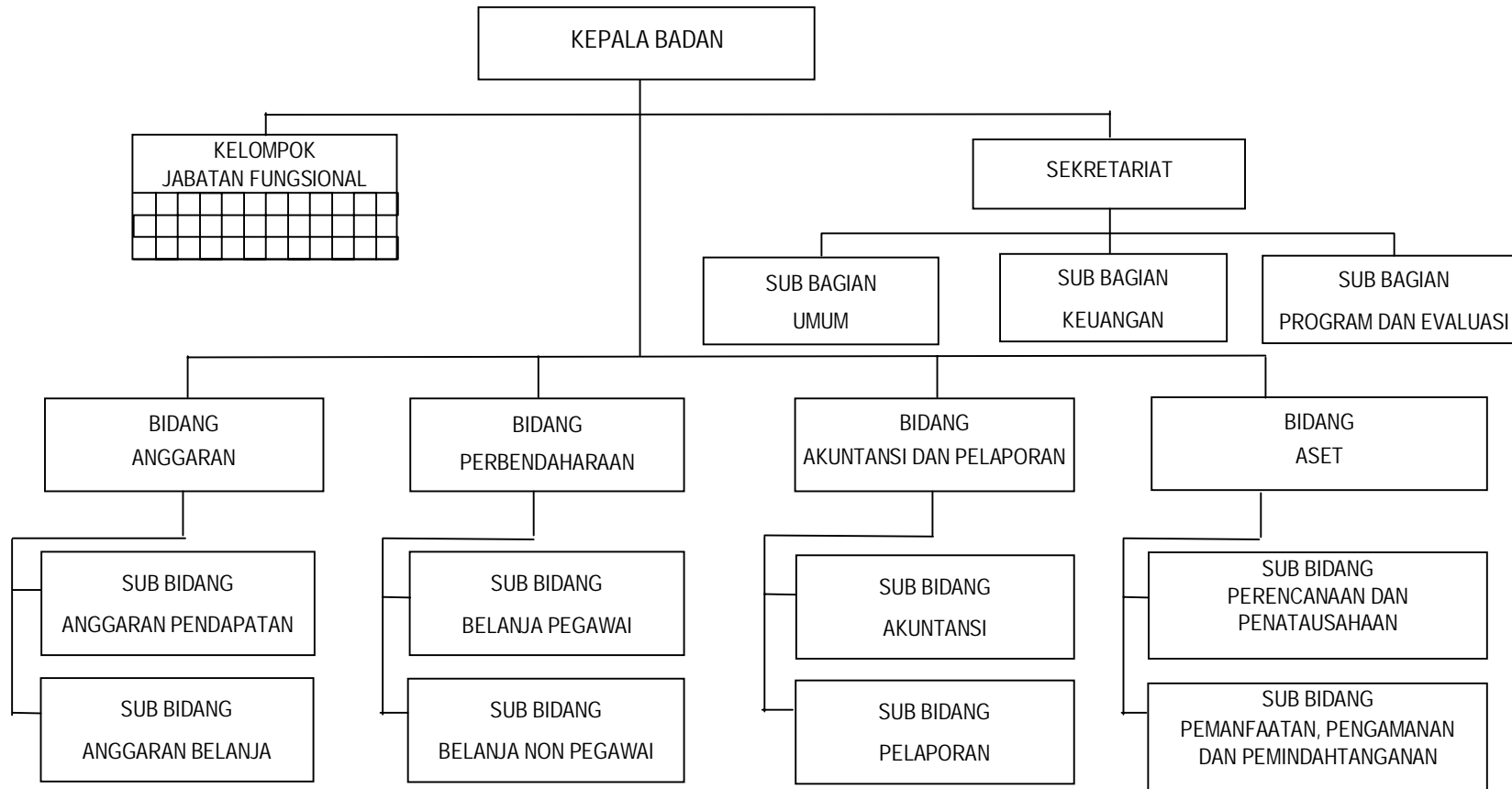
(Data per 31 Desember 2020)

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural adalah : 16 orang, dan jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional umum adalah : 33 orang.

1.3.4 Bagan Susunan Organisasi

Bagan susunan organisasi BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KABUPATEN NGANJUK



1.3.5 Sarana dan Prasarana

BPKAD Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan selain sumber daya aparatur yang terkait kepegawaian juga didukung dengan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan BPKAD Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan Program dan Kegiatan.

Dukungan sumber daya sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

1. Gedung dan Kantor

BPKAD Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu perangkat daerah yang menempati sebuah gedung dan kantor serta berdomisili di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

2. Alat-alat Angkutan :

Sarana kendaraan operasional yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

No.	Pemakai	Jenis kendaraan		Jumlah
		Roda 4	Roda 2	
1.	Pejabat Eselon II	1		1
2.	Pejabat Eselon III	5		5
3.	Pejabat Eselon IV		11	11
4.	Operasional BPKAD	1	1	2
	Jumlah	7	12	19

3. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Selain gedung kantor dan kendaraan operasional yang mendukung, sarana dan prasarana lain yaitu peralatan dan perlengkapan kantor yang lengkap dan memadai juga sangat mendukung kelancaran tugas. Dari sebagian peralatan dan perlengkapan kantor yang menjadi tanggung jawab BPKAD sampai saat ini kondisinya relatif masih bagus, namun ada juga yang sudah usang dan tidak bisa dipakai sehingga perlu diganti.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagai implementasi ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan beserta program dan kegiatan yang mendukung pembangunan. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Sejalan dengan **visi** RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018 – 2023 yakni ” **Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)**” dan misi yang sesuai dengan Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja BPKAD Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset yaitu **Misi nomor 2 (dua) ” Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan**”, maka BPKAD Kabupaten Nganjuk memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja yang tentunya sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Nganjuk tersebut diatas sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian	Target				
			Tahun Awal	Akhir Periode Renstra			Tahun Awal	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas out come disamping output dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD 2. Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi 3. Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	100 100 100
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	1. Prosentase Laporan Barang Milik Daerah yang tervalidasi	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 572,760,000.00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 531,500,000.00	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 300,000,000.00	APBD
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 30,000,000.00	APBD
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah	Rp. 1,649,829,000.00	APBD
6. Program Peningkatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 766,975,000.00	APBD

7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	775,550,000.00	APBD
8	Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	157,000,000.00	APBD
9.	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	1,670,400,000.00	APBD

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan 4 program rutin dengan 20 kegiatan dan 5 program penunjang keuangan dengan 24 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Nganjuk dengan total anggaran setelah mengalami perubahan APBD sebesar Rp. 6.454.014.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Belas Ribu Rupiah).

Gambaran mengenai keterkaitan antar Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja, Program Anggaran yang mendukung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	% Total Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.783.614.000,00	49,46 %
		2. Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi			
		3. Prosentase ketepatan waktu			

		penerbitan SP2D			
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	1. Prosentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi	Peningkatan pengelolaan aset daerah	1.670.400.000,00	25,88 %

*) Total Anggaran = 6.454.014.000,00

Adapun rincian total anggaran yang dikelola BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebelum dan setelah Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Tahun 2020

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1	2	5	6	7
A.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	572,760,000	366,075,000	(206,685,000)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116,010,000	126,630,000	10,620,000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46,000,000	45,000,000	(1,000,000)
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42,000,000	20,000,000	(22,000,000)
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000	20,000,000	(10,000,000)

6	Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	2,000,000	(3,000,000)
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000	2,100,000	(900,000)
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	52,500,000	47,000,000	(5,500,000)
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	250,000,000	80,000,000	(170,000,000)
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)
11	Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	5,250,000	10,000,000	4,750,000
12	Pengelolaan dan Pendokumentasian arsip perangkat daerah	10,000,000	5,345,000	(4,655,000)
B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	531,500,000	324,000,000	(207,500,000)
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000	0	(20,000,000)
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	90,000,000	90,000,000	-
3	Pengadaan mebeleur	45,000,000	0	(45,000,000)
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	69,000,000	69,000,000	-
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,000,000	75,000,000	(25,000,000)

6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	10,000,000	-
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	115,500,000	80,000,000	(35,500,000)
8	Pemeliharaan rutin/berkala meubeller	7,000,000	0	(7,000,000)
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	75,000,000	0	(75,000,000)
C.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	300,000,000	82,839,000	(217,161,000)
1	Peningkatan kemampuan teknis aparatur	300,000,000	82,839,000	(217,161,000)
D.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,000,000	22,000,000	(8,000,000)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	19,500,000	(5,500,000)
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2,500,000	0	(2,500,000)
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000	2,500,000	-
E.	Peningkatan dan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah	1,649,829,000	1,855,339,000	205,510,000
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	488,093,000	515,800,000	27,707,000

2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	420,750,000	345,000,000	(75,750,000)
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang P. APBD	365,700,000	479,253,000	113,553,000
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran P. APBD	375,286,000	515,286,000	140,000,000
F.	Peningkatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	766,975,000	515,626,100	(251,348,900)
1	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	437,225,000	361,821,000	(75,404,000)
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	99,750,000	90,000,000	(9,750,000)
3	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelola Keuangan Daerah	125,000,000	0	(125,000,000)
4	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran	52,500,000	39,473,100	(13,026,900)
5	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Laporan Keuangan SKPD	52,500,000	24,332,000	(28,168,000)
G.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	775,550,000	553,290,000	(222,260,000)

1	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	40,950,000	43,000,000	2,050,000
2	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Umum Daerah	654,600,000	485,690,000	(168,910,000)
3	Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Dana Transfer	80,000,000	24,600,000	(55,400,000)
H.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	157,000,000	109,300,000	(47,700,000)
1	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)
2	Implementasi SIMDA Keuangan Daerah	80,000,000	39,300,000	(40,700,000)
3	Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah PPKD	52,000,000	50,000,000	(2,000,000)
I.	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,670,400,000	942,297,800	(728,102,200)
1	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah	25,000,000	14,816,000	(10,184,000)
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	490,400,000	401,998,400	(88,401,600)
3	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100,000,000	57,236,000	(42,764,000)

4	Penilaian Barang Milik Daerah	85,000,000	40,490,000	(44,510,000)
5	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	50,000,000	32,050,000	(17,950,000)
6	Penghapusan Barang Milik Daerah	45,000,000	26,085,000	(18,915,000)
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	265,000,000	208,866,500	(56,133,500)
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	50,000,000	20,018,500	(29,981,500)
9	Inventarisasi/Sensus BMD	410,000,000	122,649,900	(287,350,100)
10	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	25,000,000	18,087,500	(6,912,500)
11	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	125,000,000	0	(125,000,000)
	JUMLAH BPKAD	6,454,014,000	4,770,766,900	(1,683,247,100)

Sumber Data : APBD dan P. APBD BPKAD Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya BPKAD Kabupaten Nganjuk perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja dinas selanjutnya. Hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Untuk melaksanakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja Tahun 2020, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten Nganjuk menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Hasil analisis capaian kinerja Kabupaten Nganjuk disajikan sebagai berikut :

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pencapaian Target Tahun 2020

BPKAD Kabupaten Nganjuk telah menetapkan 2 sasaran yang ingin dicapai di tahun 2020 ini. Dari sasaran tersebut, semuanya dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Capaian sasaran tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja 2019

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019		
	Target	Realisasi	Capaian
1. Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD	100 %	100 %	100 %
2. Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi	100 %	100 %	100 %
3. Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	100 %	100 %	100 %
4. Prosentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi	100 %	100 %	100 %
Jumlah rata rata capaian kinerja			100%

Tabel 3.1.1
Pencapaian Indikator Kinerja 2020

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020		
	Target	Realisasi	Capaian
1. Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD	100 %	100 %	100 %
2. Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi	100 %	100 %	100 %
3. Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	100 %	100 %	100 %
4. Prosentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi	100 %	100 %	100 %
Jumlah rata rata capaian kinerja			100%

Tabel 3.1.1.1

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020

Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	100 %	100 %

Analisis terhadap pencapaian sasaran Tahun 2020 diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

a. Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD

- Indikator ini tercapai **100%** pada Tribulan IV yaitu pada saat pengajuan RKA oleh OPD. Karena dalam penyusunan R. APBD menjadi APBD secara tepat waktu harus didahului dengan pengajuan RKA.
- Jumlah OPD yang RKA-nya sesuai ketentuan sebanyak 50 OPD
- Dikarenakan adanya integrasi E-Planning ke E Budgeting sehingga pada saat penyusunan RKA ada beberapa yang perlu pembenahan pada rekening OPD dan juga masih adanya beberapa OPD yang dalam penyusunan RKA belum mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan (penempatan kode rekening belum sesuai dengan penganggarannya).

b. Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi

- Indikator ini tercapai **100%** pada Semester I, Tribulan III dan Tribulan IV yang digunakan untuk penyusunan Laporan Semester dan LKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi sebanyak 50 OPD
- Namun demikian masih ada beberapa OPD kurang memperhatikan masalah penatausahaan keuangan daerah, sehingga pelaporannya belum dapat divalidasi karena masih perlu pembenahan.

c. **Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D**

- Penerbitan SP2D merupakan indikator yang menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan penyerapan anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- SP2D dapat diterbitkan 100% (tepat waktu) apabila dokumen SPM yang diajukan oleh OPD dinyatakan lengkap oleh Kuasa BUD paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- Jumlah SPM yang diajukan oleh 50 OPD ke BUD untuk diterbitkan menjadi SP2D tahun 2020 sebanyak 5.583 SPM dan semuanya telah diterbitkan SP2D-nya yang dapat diketahui pada Register SP2D di Aplikasi SIMDA.
- Capaian dari indikator ini telah terpenuhi **100%**, namun demikian dalam proses pengajuan SPM oleh OPD untuk kelengkapan dokumen pengajuan masih ada yang belum lengkap/terpenuhi dan perlu perbaikan dokumen.

2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Prosentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang tervalidasi sebanyak 50 OPD
- Indikator ini telah tercapai sebesar **100%** dengan telah terlaksananya Rekonsiliasi aset Semester I dan Semester II.
- Secara kuantitas laporan keadaan barang milik daerah dari masing-masing OPD telah dilaporkan secara tepat waktu tetapi secara kualitas laporannya masih banyak yang harus dibenahi.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020 didukung oleh hasil-hasil program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran. Indikator program ini indeks kepuasan masyarakat.

Realisasi anggaran program ini terserap 92,34% atau sebesar Rp. 338.023.660,00 dari anggaran Rp. 366.075.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini digunakan untuk pengiriman paket, distribusi surat keluar (2.883 surat), pencatatan surat masuk (4.081 surat) dan pembelian tera cek.
- d) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
- Pembayaran listrik kantor BPKAD selama 12 bulan
 - Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan
 - Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini berupa pembayaran kepada jasa cleaning service untuk membersihkan kantor, halaman kantor dan pemeliharaan taman selama 12 bulan.
- f) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini berupa belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk sebanyak 73 jenis ATK.
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor berupa 4 jenis buku peraturan, 2 jenis amplop dinas, 1 jenis stopmap dinas dan kebutuhan fotokopi untuk kantor.
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini digunakan untuk belanja komponen/penerangan bangunan kantor BPKAD
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku lain.
- j) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini diperuntukkan untuk penyediaan makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu.
- k) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

- l) **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**
Kegiatan ini digunakan untuk monitoring, koordinasi dan evaluasi dalam daerah.
- m) **Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih**
Kegiatan ini untuk pembelian peralatan dan bahan pembersih di kantor.
- l. **Pengelolaan dan Pendokumentasian arsip perangkat daerah**
Kegiatan ini untuk penatausahaan dan ketatalaksanaan kearsipan perangkat daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas. Indikator program ini Prosentase Sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara baik.

Realisasi anggaran program ini terserap 97,73% atau sebesar Rp. 316.629.088,00 dari anggaran Rp. 324.000.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a) **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**
Kegiatan ini untuk pengadaan 2 unit AC 2 PK dan ditunda pelaksanaannya karena Refocussing Anggaran.
- b) **Pengadaan peralatan gedung kantor**
Kegiatan ini untuk pengadaan peralatan kerja berupa 2 buah laptop, 2 buah PC, 1 buah printer, 1 buah scanner. Untuk proses pengadaan melalui Penunjukan Langsung.
- c) **Pengadaan mebeleur**
Kegiatan ini untuk pengadaan 2 buah kursi pejabat dan 2 buah kursi putar dan ditunda pelaksanaannya karena Refocussing Anggaran.
- d) **Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**
Kegiatan ini untuk pembayaran honorarium THL sebanyak 4 (empat) orang dan pemeliharaan gedung.
- e) **Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**
Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 6 unit kendaraan roda empat, 12 unit kendaraan roda

dua dan belanja bahan bakar kendaraan operasional roda 4 untuk eselon II dan eselon III serta untuk membayar pajak tahunan kendaraan.

- f) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini untuk pemeliharaan AC perlengkapan gedung kantor selama satu tahun anggaran.
- g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 12 bulan berupa service printer dan pemeliharaan jaringan SIMDA.
- h) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kegiatan ini pemeliharaan mebeleur kantor selama 12 bulan dan ditunda pelaksanaannya karena Refocussing Anggaran.
- i. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan ini digunakan untuk rehabilitasi sedang/berat gedung kantor selama 12 bulan dan ditunda pelaksanaannya karena Refocussing Anggaran.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator program ini Prosentase ASN yang memenuhi kriteria mendapat diklat min 20 JP/ th.

Realisasi anggaran program ini terserap 98,51% atau sebesar Rp. 81.602.750,00 dari anggaran Rp. 82.839.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Peningkatan kemampuan teknis aparatur
Kegiatan ini untuk pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

Program ini berkaitan dengan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. Indikator program ini Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu.

Realisasi anggaran program ini terserap 89,08% atau sebesar Rp. 19.596.600,00 dari anggaran Rp. 22.000.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a) Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini menghasilkan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun Anggaran 2020.
- b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini untuk penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 bulan berikutnya dan ditunda pelaksanaannya karena Refocussing Anggaran.
- c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2020. Produk ini sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran.

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah

Program ini bertujuan demi terlaksananya penyusunan anggaran daerah yang berbasis kinerja. Indikator program ini yaitu Ketepatan waktu penyusunan penganggaran (APBD dan P. APBD).

Realisasi anggaran program ini terserap 83,17% atau sebesar Rp. 1.543.004.181,00 dari anggaran Rp. 1.855.339.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan buku Raperda APBD 2021 (75 buku), Perda APBD 2020 (130 buku), SE Penyusunan RKA 2021 (75 buku), Nota Keuangan APBD 2021 (75 buku) dan Standar biaya 2020 (160 buku)
- b. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan buku Raperbup Penjabaran APBD 2021 (20 buku), Perbup Penjabaran APBD 2020 (130 buku).
- c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan buku Raperda P.APD 2020 (70 buku), Perda P.APD 2020 (130 buku), SE Penyusunan RKA 2020 (70 buku), Nota Keuangan APBD 2020 (70 buku)

- d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan buku Raperbup penjabaran P.APBD 2020 (2 buku), Perbup penjabaran P.APBD 2020 (225 buku)

6. Program Peningkatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Program ini merupakan serangkaian prosedur pelaporan keuangan yang meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD.

Indikator program ini ketepatan waktu penyusunan LKPD.

Realisasi anggaran program ini terserap 77,69% atau sebesar Rp. 400.585.385,00 dari anggaran Rp. 515.626.100,00. Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2019 (55 buku), Lampiran Perda Pertanggungjawaban APBD (55 buku) dan 60 buah CD.
- b. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2019 (55 buku) dan 60 buah CD
- c. Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis realisasi Anggaran
Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan berikutnya sebanyak 60 buku.
- d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan SKPD
Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan SKPD selama 1 (satu) tahun anggaran, untuk konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 12 buku.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Indikator program ini Prosentase OPD yang mengajukan SPM sesuai ketentuan. Realisasi anggaran program ini terserap 88,36% atau sebesar Rp. 488.889.200,00 dari anggaran Rp. 553.290.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan pedoman pelaksanaan APBD dan perubahannya.
- b. Pengelolaan dan Pengendalian Kas Umum Daerah
Kegiatan ini digunakan untuk pengelolaan dan pengendalian kas umum daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- c. Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Dana Transfer
Kegiatan ini digunakan untuk pengelolaan dana transfer selama 1 (satu) tahun anggaran.

8. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini merupakan pendukung dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Indikator program ini Jumlah ASN pengelola keuangan daerah yang terfasilitasi. Realisasi anggaran program ini terserap 97,87% atau sebesar Rp. 106.970.000,00 dari anggaran Rp. 109.300.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kegiatan ini digunakan untuk pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 55 SK selama 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Implementasi SIMDA keuangan Daerah
Kegiatan ini digunakan untuk pendampingan SIMDA Keuangan bagi 50 OPD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- c. Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak terduga dan Pembiayaan Daerah PPKD
Kegiatan ini digunakan untuk operasional pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan PPKD selama 1 (satu) tahun anggaran.

9. Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi semua aktifitas yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtangan barang milik daerah.

Indikator program ini Ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Realisasi Anggaran program ini sebesar Rp. 840.354.420,00 dari anggaran Rp. 942.297.800,00 atau sebesar 89,18%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah
Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan RKBMD dan RKPBMMD 52 OPD.
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan buku inventaris/tertibnya pengelolaan barang milik daerah 52 OPD, serta pengadaan jasa konsultan SIM ASET
- c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini menghasilkan pelunasan sewa tanah eks bengkok 90% dan terlaksananya pinjam pakai terhadap barang milik daerah sejumlah 26 unit.
- d. Penilaian Barang Milik Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan penaksiran nilai sewa tanah eks bengkok \pm 400 Ha dan nilai sewa 8 bangunan gedung.
- e. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini untuk pemindahtangan BMD melalui hibah sebanyak 94 unit terdiri dari tanah, bangunan gedung dan peralatan mesin/kantor. Antara lain ke Yayasan Al Mubarakah berupa mobil, hibah ke KODIM berupa tanah untuk KORAMIL Bagor dan hibah ke BNN berupa peralatan dan mesin
- f. Penghapusan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini digunakan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah di 7 OPD dikarenakan pemusnahan dan hibah. Antara lain penghapusan BMD yang dipindahtangankan/dihibahkan termasuk penghapusan peralatan dan mesin di Puskesmas Berbek, SMP 2 Lengkong, SDN 2 Sukomoro dan SDN Nglundo

- g. Pengamanan Barang Milik Daerah.
Sampai dengan saat ini sudah terealisasi pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah 281 sertifikat, pengajuan sertifikat sebanyak 15 bidang dan terbitnya gambar untuk pengajuan IMB sebanyak 13 gambar bangunan.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran PBB 8 bidang aset Pemda, pajak kendaraan bermotor 7 unit, pembayaran listrik rumah dinas sebanyak 3 rumah dinas.
- i. Inventarisasi/sensus BMD
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pendataan sensus BMD berupa alat komputer di 20 Kecamatan dan pengadaan Aplikasi/bartender BMD.
- j. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
Hasil kegiatan ini adalah terselesaikannya kasus kerugian daerah sebanyak 9 kasus kerugian temuan BPK RI dan tersusunnya Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi anggaran tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.508.500,- atau 83,62%. Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat (penerimaan surat masuk sebanyak 4.081 surat dan surat keluar sebanyak 2.883 surat serta pendistribusiannya)

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 126.630.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 116.685.905,- atau 92,15%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Pembayaran listrik kantor BPKAD selama 12 bulan
- Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan
- Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan

- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 44.352.000,- atau 98,56%. Kegiatan ini berupa pembayaran kepada jasa cleaning service untuk membersihkan kantor, halaman kantor dan pemeliharaan taman selama 12 bulan.
- d) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 19.976.550,- atau 99,88%. Kegiatan ini berupa belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk sebanyak 73 jenis ATK.
- e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 18.447.130,- atau 92,24%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor berupa 4 jenis buku peraturan, 2 jenis amplop dinas, 1 jenis stopmap dinas dan kebutuhan fotokopi untuk kantor.
- f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.713.000,- atau 85,65%. Kegiatan ini digunakan untuk belanja komponen/penerangan bangunan kantor BPKAD
- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku lain.
- h) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.880.075,- atau 78,47%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk penyediaan makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu.
- i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 77.087.900,- atau sebesar 96,36%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

- j) **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.- dan telah terealisasi Rp. 3.350.000,- atau sebesar 67%. Kegiatan ini digunakan untuk monitoring, koordinasi dan evaluasi dalam daerah.
 - k) **Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.- dan telah terealisasi Rp. 9.593.600,- atau sebesar 95,94%. Kegiatan ini untuk pembelian peralatan dan bahan pembersih di kantor.
 - l) **Pengelolaan dan Pendokumentasian arsip perangkat daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.345.000.- dan telah terealisasi Rp. 5.329.000,- atau sebesar 99,70%. Kegiatan ini untuk penatausahaan dan ketatalaksanaan kearsipan perangkat daerah.
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- a) **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan sehubungan dengan refocussing anggaran maka kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya.
 - b) **Pengadaan peralatan gedung kantor**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 89.347.000,- atau sebesar 99,27%. Kegiatan ini untuk pengadaan peralatan kerja berupa 2 buah laptop, 2 buah PC, 1 buah printer, 1 buah scanner. Untuk proses pengadaan melalui Penunjukan Langsung.
 - c) **Pengadaan mebeleur**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000,- dan sehubungan dengan refocussing anggaran maka kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya.
 - d) **Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 68.380.500,- atau sebesar 99,10%. Kegiatan ini untuk pembayaran honorarium THL sebanyak 4 (empat) orang dan pemeliharaan gedung.
 - e) **Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 69.033.108,- atau sebesar 92,04%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 6 unit kendaraan roda empat, 12 unit kendaraan roda dua dan belanja bahan bakar kendaraan operasional roda 4 untuk eselon II dan eselon III serta untuk membayar pajak tahunan kendaraan.

- f) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 9.984.480,-. atau sebesar 99,84%. Kegiatan ini untuk pemeliharaan AC perlengkapan gedung kantor selama satu tahun anggaran.
 - g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 79.884.000,-. atau sebesar 99,86%. Kegiatan ini untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 12 bulan berupa service printer dan pemeliharaan jaringan SIMDA.
 - h) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- dan sehubungan dengan refocussing anggaran maka kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya.
 - i) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- dan sehubungan dengan refocussing anggaran maka kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Peningkatan kemampuan teknis aparatur
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 82.839.000,- .dan telah terealisasi Rp. 81.602.750,- atau sebesar 98,51%. Kegiatan ini untuk pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
- a) Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.500.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 17.200.400,- atau 88,21%. dengan hasil berupa Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun Anggaran 2020.

b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan sehubungan dengan refocussing anggaran maka kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya.

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan realisasi Rp. 2.396.200,- atau 95,85% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2020. Produk ini sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran.

5). Program Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah

a) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 515.800.000,- dan telah terealisasi Rp. 332.281.100,-. atau sebesar 64,42%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan buku Raperda APBD 2021 (75 buku), Perda tentang APBD 2020 (130 buku), SE Penyusunan RKA Tahun 2021 (75 buku), Nota Keuangan APBD 2021 (75 buku) dan Standart Biaya 2020 (160 buku).

b) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 345.000.000,- baru terealisasi Rp. 315.803.600,- atau sebesar 91,54%. Kegiatan ini untuk pembuatan Buku Raperbup Penjabaran APBD 2021 (20 buku) dan Perbup Penjabaran APBD 2020 (130 buku).

c) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 479.253.000,- dan telah terealisasi Rp. 424.032.921,-. atau sebesar 88,48%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan buku Raperda P. APBD 2020 (70 buku), Perda P. APBD 2020 (130 buku), SE Penyusunan RKAP (70 buku) dan Nota Keuangan (70 buku)

e) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 515.286.000,- baru terealisasi Rp. 470.886.560,- atau sebesar 91,38%. Kegiatan ini untuk pembuatan Buku Perbup Penjabaran P.APD TA 2020 (225 buku), Raperbup (2 buku), dan buku Perubahan Perbup APBD TA. 2020 (130 buku).

- 6). Program Peningkatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 361.821.000,- dan telah terealisasi Rp. 286.700.935,- atau sebesar 79,24%. Hasil kegiatan ini berupa buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (55 buku), lampiran Perda Pertanggungjawaban (55 buku) dan 60 CD.
 - b). Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 65.093.450,- atau sebesar 72,33%. Kegiatan ini menghasilkan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 (55 buku) dan 60 CD.
 - c) Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan sehubungan dengan refocussing anggaran maka kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya.
 - d) Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.473.100.000,- dan telah terealisasi Rp. 29.823.800,-. atau sebesar 75,55%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Laporan Semester dan Prognosis 6 bulan berikutnya sebanyak 60 buku.
 - e) Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.332.000,- dan telah terealisasi Rp. 18.967.200,- atau sebesar 77,95 %. Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan SKPD selama satu tahun anggaran untuk konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 12 buku
- 7). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 43.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 6.000.000,-. atau sebesar 13,95%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan perubahannya.

- b) **Pengelolaan dan Pengendalian Kas Umum Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 485.690.000,- dan telah terealisasi Rp. 466.266.200,- atau sebesar 96,00%. Kegiatan ini digunakan untuk Pengelolaan dan Pengendalian Kas Umum Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- c) **Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Dana Transfer**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.600.000,- dan telah terealisasi Rp. 16.623.000,- atau sebesar 67,57%. Kegiatan ini digunakan untuk pengelolaan dana transfer selama 1(satu) tahun anggaran.

8). **Program Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah**

- a) **Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 18.043.000,- atau sebesar 90,22%. Kegiatan ini digunakan untuk pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan hasil sebanyak 55 bendel selama 1 (satu) tahun anggaran.
- b) **Implementasi SIMDA Keuangan Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.300.000,- dan telah terealisasi Rp. 39.000.000,- atau sebesar 99,24%. Kegiatan ini digunakan untuk Pendampingan SIMDA Keuangan bagi SKPD selama 1 (satu) tahun anggaran
- c) **Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah PPKD**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 49.669.750,- atau sebesar 99,85%. Kegiatan ini digunakan untuk operasional pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah PPKD.

9). **Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a) **Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.816.000,- dan telah terealisasi Rp. 14.705.500,- atau sebesar 99,25%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan RKBMD dan RKPBM 52 OPD

- b) **Penatausahaan Barang Milik Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 401.998.400,- dan telah terealisasi Rp. 397.503.100,- atau sebesar 98,88%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan buku inventaris/tertibnya pengelolaan barang milik daerah 52 OPD, serta pengadaan jasa konsultan SIM ASET
- c) **Pemanfaatan Barang Milik Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 57.236.000,- dan telah terealisasi Rp. 51.524.500,- atau sebesar 90,02%. Kegiatan ini menghasilkan pelunasan sewa tanah eks bengkok 90% dan terlaksananya pinjam pakai terhadap barang milik daerah sejumlah 26 unit.
- d) **Penilaian Barang Milik daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.490.000,- dan telah terealisasi Rp. 22.325.950,- atau sebesar 55,14%. Kegiatan ini dilaksanakan penaksiran nilai sewa tanah eks bengkok ± 400 Ha dan nilai sewa 8 bangunan gedung.
- e) **Pemindahtanganan Barang Milik Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 32.050.000,- dan telah terealisasi Rp. 22.569.013,- atau sebesar 70,42%. Kegiatan ini untuk pemindahtanganan BMD melalui hibah sebanyak 94 unit terdiri dari tanah, bangunan gedung dan peralatan mesin/kantor. Antara lain ke Yayasan Al Mubarakah berupa mobil, hibah ke KODIM berupa tanah untuk KORAMIL Bagor dan hibah ke BNN berupa peralatan dan mesin
- f) **Penghapusan Barang Milik Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.085.000,- dan telah terealisasi Rp. 19.225.000,- atau sebesar 73,70%. Kegiatan ini digunakan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah di 7 OPD dikarenakan pemusnahan dan hibah. Antara lain penghapusan BMD yang dipindahtangankan/dihibahkan termasuk penghapusan peralatan dan mesin di Puskesmas Berbek, SMP 2 Lengkong, SDN 2 Sukomoro dan SDN Nglundo
- g) **Pengamanan Barang Milik Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 208.866.500,- dan telah terealisasi Rp. 179.656.570,- atau sebesar 86,02%. Sampai dengan saat ini sudah terealisasi pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah 281 sertifikat, pengajuan sertifikat sebanyak 15 bidang dan terbitnya gambar untuk pengajuan IMB sebanyak 13 gambar bangunan.

- h) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.018.500,- dan telah terealisasi Rp. 14.107.587,- atau sebesar 70,47%. Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran PBB 8 bidang aset Pemda, pajak kendaraan bermotor 7 unit, pembayaran listrik rumah dinas sebanyak 3 rumah dinas.
- i) **Inventarisasi/Sensus BMD**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 122.649.900,- dan telah terealisasi Rp. 106.460.200,- atau sebesar 86,80%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk pendataan sensus BMD berupa alat komputer di 20 Kecamatan dan pengadaan Aplikasi/bartender BMD
- j) **Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.087.500,- dan telah terealisasi Rp. 12.277.000,- atau sebesar 67,88%. Hasil kegiatan ini adalah terselesaikannya kasus kerugian daerah sebanyak 9 kasus kerugian temuan BPK RI dan tersusunnya Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian.
- k) **Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan sehubungan dengan refocussing anggaran maka kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya.

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian Kinerja BPKAD pada tahun ini relatif cukup berhasil, dengan realisasi target kinerja tahun 2020 yang didukung dengan 9 program dan 52 kegiatan hampir keseluruhannya tercapai.

Sedangkan pencapaian sasaran pembangunan Daerah untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD dengan target WTP untuk LKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2019 telah disampaikan secara tepat waktu pada bulan Maret 2020 dan opini yang diterima dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang dikeluarkan oleh BPK (***Management Letter***) dapat tercapai. Hal tersebut tercapai dengan dukungan dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 OPD yang telah seluruhnya mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan secara mandiri.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Nganjuk ini, masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk mencapai hasil sesuai tujuan, kelemahan dalam penyajian data-data yang mendukung uraian dan analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini.

Akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Nganjuk tahun 2020 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan